

**REKONFIGURASI KEBIJAKAN PUBLIK PERKOTAAN DALAM MENJAWAB
KOMPLEKSITAS TATA KELOLA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR****Neli Yuliawati¹, Farida Santika²****^{1,2}Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara**Corresponding Author: neliyuliawati85@gmail.com

ABSTRACT

Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan menjadi isu strategis dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks. Kabupaten Cianjur sebagai wilayah dengan karakteristik transisi antara kawasan perdesaan dan perkotaan menghadapi berbagai tantangan tata kelola, mulai dari pertumbuhan penduduk, urbanisasi, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis studi literatur dan dokumen kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, integrasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Rekonfigurasi kebijakan diharapkan mampu menciptakan tata kelola perkotaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.

Kata kunci: Rekonfigurasi, Kebijakan Publik,, Tata Kelola Pemerintahan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

INTRODUCTION

Perkembangan kawasan perkotaan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks seiring dengan laju urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan social dan struktur ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu merespons dinamika tersebut melalui kebijakan publik yang adaptif dan responsif. Menurut Dunn (2018), masalah publik bersifat multidimensional dan saling terkait sehingga memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Kebijakan publik perkotaan tidak lagi dapat dirancang secara sektoral dan parsial, melainkan membutuhkan pendekatan terintegrasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika perkotaan cukup signifikan terutama pada wilayah pusat pemerintahan dan kawasan penyangga aktivitas ekonomi. Transformasi wilayah dari karakter perdesaan menuju perkotaan membawa implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, penataan ruang, serta pengelolaan lingkungan. Perkembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi, peningkatan kebutuhan layanan dasar, serta tekanan terhadap lingkungan perkotaan menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang efektif. Kompleksitas permasalahan perkotaan di Kabupaten Cianjur mencerminkan kebutuhan akan penataan ulang atau rekonfigurasi kebijakan publik agar lebih selaras dengan kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah sering kali menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang efektif dan akuntabel.

Howlett dan Ramesh (2016) memandang rekonfigurasi kebijakan sebagai proses penyesuaian dan penataan ulang desain kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara tujuan kebijakan, instrumen kebijakan, dan konteks permasalahan yang dihadapi pemerintah. Rekonfigurasi diperlukan ketika kebijakan yang ada tidak lagi efektif dalam merespons perubahan lingkungan strategis. Rekonfigurasi kebijakan publik merupakan suatu proses penataan ulang kebijakan yang

dilakukan untuk menyesuaikan arah, substansi, dan mekanisme kebijakan dengan perubahan lingkungan strategis serta kompleksitas permasalahan publik yang dihadapi. Dunn (2018) menyatakan bahwa masalah publik memiliki karakter multidimensional dan saling terkait, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang bersifat parsial atau sektoral, melainkan memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Dalam konteks pemerintahan daerah, rekonfigurasi kebijakan tidak hanya berfokus pada perubahan regulasi, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas implementasi kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang dirancang tanpa mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan tata kelola berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam implementasinya. Menurut Peters (2015), rekonfigurasi dalam kebijakan publik merupakan upaya restrukturisasi tata kelola dan mekanisme kebijakan agar lebih adaptif, fleksibel, dan mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan publik yang bersifat lintas sektor. Rekonfigurasi tidak hanya mencakup perubahan kebijakan formal, tetapi juga perubahan pola koordinasi dan interaksi antar aktor kebijakan. Oleh karena itu, rekonfigurasi kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk memperbaiki kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Rekonfigurasi ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah, serta konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, rekonfigurasi kebijakan publik juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Kebijakan yang direkonfigurasi diharapkan mampu menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Partisipasi aktif para aktor tersebut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan publik.

Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dipahami sebagai proses penyesuaian, pembaruan, dan penguatan kebijakan yang ada agar mampu menjawab tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, rekonfigurasi kebijakan menjadi penting untuk memastikan sinergi antar kebijakan sektoral, efektivitas implementasi program, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimana rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dapat menjadi strategi dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain itu, rekonfigurasi kebijakan publik menuntut adanya inovasi dalam proses kebijakan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan. Inovasi kebijakan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses birokrasi, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, rekonfigurasi kebijakan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga transformasional dalam mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif.

Kompleksitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Cianjur tercermin dari beragamnya aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Interaksi antar aktor tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kebijakan publik yang komprehensif. Akibatnya, berbagai permasalahan perkotaan seperti ketimpangan pelayanan publik, permasalahan permukiman, kemacetan, serta degradasi lingkungan masih menjadi isu yang berulang dan belum tertangani secara optimal. Menurut Osborne (2010), tata kelola pemerintahan modern menekankan kolaborasi antar aktor sebagai respon terhadap kompleksitas permasalahan publik.

Dalam konteks tersebut, rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan menjadi kebutuhan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur. Rekonfigurasi kebijakan dipahami sebagai upaya penataan ulang kebijakan yang mencakup perbaikan desain kebijakan, penguatan koordinasi kelembagaan, serta penyesuaian mekanisme implementasi agar lebih sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat perkotaan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan publik daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan kebijakan publik, tata kelola perkotaan, dan pemerintahan daerah. Selain itu, analisis dokumen perencanaan dan regulasi daerah Kabupaten Cianjur digunakan untuk memahami konteks kebijakan yang sedang berjalan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji substansi kebijakan, mengidentifikasi permasalahan utama dalam tata kelola perkotaan, serta menganalisis kebutuhan rekonfigurasi kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan publik perkotaan dan kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah.

FINDING AND DISCUSSION

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompleksitas tata kelola perkotaan di Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain fragmentasi kebijakan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah. Kebijakan publik perkotaan yang ada cenderung bersifat sektoral sehingga kurang mampu menjawab permasalahan lintas sektor seperti kemacetan, permukiman kumuh, pengelolaan lingkungan, dan ketimpangan pelayanan publik. Tata kelola perkotaan di Kabupaten Cianjur dihadapkan pada kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Permasalahan perkotaan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek kelembagaan, koordinasi kebijakan, dan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons dinamika perubahan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Dunn yang menyatakan bahwa permasalahan publik bersifat multidimensional dan saling terkait sehingga membutuhkan kebijakan yang adaptif dan terintegrasi agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam praktiknya, kebijakan publik perkotaan di Kabupaten Cianjur masih menunjukkan kecenderungan sektoral, di mana setiap perangkat daerah menjalankan kebijakan berdasarkan kewenangannya masing-masing tanpa integrasi yang kuat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya tumpang tindih program, ketidaksinkronan perencanaan, serta rendahnya efektivitas kebijakan dalam menjawab persoalan perkotaan. Howlett dan Ramesh menegaskan bahwa fragmentasi kebijakan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan tata kelola pemerintahan, terutama dalam konteks wilayah perkotaan yang memiliki karakteristik permasalahan lintas sektor. Dye (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan tindakan pemerintah, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, dalam merespons permasalahan publik.

Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan diperlukan melalui integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan sektoral. Hal ini mencakup penyelarasan antara rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan kebijakan pelayanan publik. Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi tumpang tindih program serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan menjadi pendekatan strategis untuk mengatasi kondisi tersebut. Rekonfigurasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan regulasi, tetapi juga sebagai penataan ulang desain kebijakan, mekanisme koordinasi, dan pola implementasi kebijakan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dye memandang kebijakan publik sebagai pilihan tindakan pemerintah, sehingga rekonfigurasi kebijakan menjadi penting ketika kebijakan yang ada tidak lagi mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan perkotaan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan. Digitalisasi tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cianjur. Penguatan partisipasi masyarakat juga menjadi aspek krusial, mengingat kebijakan publik perkotaan yang inklusif akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, rekonfigurasi kebijakan publik juga menuntut penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar perangkat daerah. Prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan penting dalam proses

rekonfigurasi kebijakan. Osborne menekankan bahwa tata kelola pemerintahan modern membutuhkan kolaborasi antar aktor sebagai respon atas kompleksitas permasalahan publik. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, peningkatan kolaborasi antar pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi faktor penentu keberhasilan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa inovasi kebijakan melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan. Digitalisasi tata kelola pemerintahan berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan United Nations yang menekankan peran e-government dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai bentuk analisis empiris, keterkaitan antara kompleksitas tata kelola dan kebutuhan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan Kabupaten Cianjur dapat dipahami melalui pemetaan aspek perencanaan, kelembagaan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kebijakan. Permasalahan fragmentasi perencanaan membutuhkan integrasi lintas sektor, lemahnya koordinasi kelembagaan menuntut penguatan mekanisme kolaborasi, keterbatasan pelayanan publik memerlukan inovasi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat membutuhkan pendekatan kebijakan yang inklusif, serta lemahnya akuntabilitas menuntut penguatan sistem monitoring dan evaluasi kebijakan. Bovens (2007) menekankan bahwa pertanggungjawaban kebijakan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan kebijakan kepada publik dan lembaga yang berwenang. Hubungan antar aspek tersebut menunjukkan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan merupakan langkah penting dan strategis dalam menjawab kompleksitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Cianjur. Rekonfigurasi kebijakan yang berlandaskan teori kebijakan publik dan prinsip tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Berikut tabel yang menggambarkan keterkaitan antara kompleksitas tata kelola, kebutuhan rekonfigurasi kebijakan, dan implikasinya terhadap tata kelola perkotaan Kabupaten Cianjur:

Tabel Rekonfigurasi Kebijakan Publik Perkotaan dalam Menjawab Kompleksitas Tata Kelola Kabupaten Cianjur

Aspek Tata Kelola	Permasalahan Utama	Pendekatan Rekonfigurasi Kebijakan	Implikasi terhadap Tata Kelola
Perencanaan Perkotaan	Fragmentasi kebijakan sektoral	Integrasi perencanaan lintas sektor	Kebijakan lebih sinkron dan efektif
Kelembagaan	Koordinasi antar OPD belum optimal	Penguatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi	Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan
Pelayanan Publik	Kualitas dan akses layanan belum merata	Inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan	Pelayanan publik lebih responsif dan transparan
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan publik masih terbatas	Pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan	Legitimasi dan keberlanjutan kebijakan meningkat
Akuntabilitas	Pengawasan kebijakan belum optimal	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi	Tata kelola lebih akuntabel dan transparan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan merupakan langkah strategis dalam menjawab kompleksitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selaras dengan teori kebijakan publik dan tata kelola, rekonfigurasi kebijakan yang menekankan integrasi, kolaborasi, dan inovasi mampu meningkatkan efektivitas kebijakan serta kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, keberhasilan rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat

kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika perkotaan.

CONCLUSIONS

Rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan merupakan kebutuhan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menjawab kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah. Kompleksitas permasalahan perkotaan menuntut adanya kebijakan yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif. Melalui penguatan koordinasi kelembagaan, integrasi perencanaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat, rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Kompleksitas permasalahan perkotaan yang bersifat multidimensional menuntut kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, tetapi terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kebijakan publik perkotaan yang ada masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta keterbatasan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis yang dikaitkan dengan landasan teori kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan perlu diarahkan pada penguatan integrasi perencanaan lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan mekanisme kolaborasi antar aktor kebijakan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi kebijakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, rekonfigurasi kebijakan publik perkotaan di Kabupaten Cianjur tidak hanya berfungsi sebagai penyesuaian kebijakan administratif, tetapi juga sebagai upaya transformasional dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Implementasi rekonfigurasi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola perkotaan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

REFERENCES

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2016). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. London: Routledge.
- Press. Widodo, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia.
- Public Policy Analysis. New York: Routledge.
- United Nations Publication. Dunn, W. N. (2018).
- United Nations. (2020). *E-Government Survey*.
- United Nations. (2020). *United Nations e-government survey 2020: Digital government in the decade of action for sustainable development*. New York: United Nations.
- Widodo, J. (2020). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- World Bank. (2017). *Governance and the law*. Washington, DC: World Bank Group.